

Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Kota Surabaya

**Selya Budi Juliana^{1*}, Septiana Dinda Aulia², Indah Ayu Oktavia³, Maulidia Mawanti⁴,
Sifa Cahya Maula⁵, Fandi Prasetya⁶**

¹²³⁴⁵⁶Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga

^{*1}Corresponding Author: selya.budi.juliana-2022@feb.unair.ac.id

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of examining the financial management performance of the Surabaya City Regional Government. By using quantitative descriptive research methods. And using secondary data sources, namely the Surabaya City Budget Realization Report (LRA) 2018 - 2022. In analyzing the performance of researchers using the independence ratio, compatibility ratio, growth ratio, and effectiveness ratio. Based on the results of the study, it was found that the ratio of regional financial independence of the Surabaya City Government in 2018-2022 was categorized as high. However, the calculation of the compatibility ratio analysis of capital expenditure compared to operational expenditure shows that there is no compatibility. The ratio of regional financial growth of the Surabaya City government is also still in the low category. and for the effectiveness ratio of Regional Original Revenue (PAD) Surabaya City is still running quite effectively. However, this study still has limitations, namely in the use of data sources which are limited to financial statement data two years before the pandemic, during the pandemic, and two years after the pandemic. With these limitations, further research is expected to expand the observation period and discuss in more detail the financial performance of local governments using qualitative methods.

Keywords: Regional Financial Management, Financial Performance, Independence Ratio, Procurement Compatibility Rate, Growth Ratio and Efficiency Ratio

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menelaah performa pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Serta menggunakan sumber data sekunder yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) kota surabaya tahun 2018 – tahun 2022. Dalam analisis performa peneliti menggunakan Rasio kemandirian, rasio keserasian, rasio pertumbuhan, dan rasio efektivitas. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2018-2022 dikategorikan tinggi. Akan tetapi untuk perhitungan analisis rasio keserasian belanja modal dibandingkan belanja operasional, menunjukkan bahwa belum ada keserasian. Rasio pertumbuhan keuangan daerah pemerintah Kota Surabaya juga masih berada pada kategori rendah. Dan untuk rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya berjalan masih cukup efektif. Namun pada penelitian ini masih memiliki keterbatasan yaitu dalam penggunaan sumber data yang terbatas pada data laporan keuangan dua tahun sebelum pandemi, selama pandemi, dan dua tahun setelah pandemi. Dengan keterbatasan ini penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas periode pengamatan dan lebih detail membahas kinerja keuangan pemerintah daerah dengan metode kualitatif.

Kata kunci: Kinerja Keuangan, Rasio Kemandirian, Rasio Keserasian Belanja, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Efektivitas

PENDAHULUAN

Pemerintah Kota Surabaya sangat memperhatikan pengelolaan keuangan daerahnya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya prestasi berupa penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan yang dipublikasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya pada tahun 2022. Dari publikasi tersebut

menginformasikan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkot Surabaya Tahun 2021 meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan hasil ini sekaligus menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya berhasil mempertahankan opini tersebut sebanyak 10 kali.

Tahun 2020, dunia menghadapi tekanan ekonomi yang cukup kuat. Wabah pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) terjadi di awal tahun 2020 menimbulkan ketidakpastian aktivitas yang dilakukan oleh manusia dan menyebabkan permasalahan ekonomi (Morita & Ono, 2024). Kondisi turunnya perekonomian menjadi kondisi nasional dan tidak terkecuali dialami oleh Pemerintah Kota Surabaya. Tingkat penyebaran COVID-19 di Surabaya, menunjukkan jumlah kasus positif yang paling tinggi dibandingkan dengan kota atau kabupaten lain di wilayah Jawa Timur. Surabaya memiliki jumlah pasien COVID-19 dapat dikatakan lebih banyak pada tanggal 20/03/2020 sampai dengan 09/07/2020 dengan kota ini menyumbang 68% dari total kasus yang ada pada periode tersebut (Virania et al., 2021). Pendekatan model *Inhomogeneous Thomas Cluster Process* menginformasikan penyebaran virus di Surabaya dipengaruhi dari padatnya pabrik dan tempat ibadah yang ada di kota tersebut (Virania et al., 2021). Penambahan satu pabrik dalam area 1 km² meningkatkan risiko COVID-19 dua kali lipat, sementara penambahan satu tempat ibadah dalam area yang sama jika dibandingkan dengan tidak ada penambahan tempat ibadah sama sekali akan meningkatkan risiko COVID-19 sebesar 4 kali lipat (Virania et al., 2021).

Refocusing dan realokasi anggaran APBD 2020 diperlukan oleh Pemerintah Kota Surabaya sebagai akibat dari krisis ekonomi dan kesehatan yang terjadi selama pandemi. (Kompas, 2020). Tabel 1 menunjukkan pencapaian pendapatan dan belanja tahun 2018 sampai tahun 2022 Pemerintah Kota Surabaya, dari tabel tersebut menunjukkan bahwa tingkat realisasi pendapatan yang diterima lebih sedikit dibandingkan dengan tingkat realisasi belanja pemerintah kota kecuali pada tahun 2021 total penerimaan pendapatan yang diterima lebih besar daripada total pengeluaran belanja yang dikeluarkan.

Tabel 1. Pencapaian Pendapatan dan Belanja Kota Surabaya 2018-2022

Tahun	Pencapaian Jumlah Pendapatan	Pencapaian Jumlah Belanja	Keterangan
2018	Rp8.175.219.120.669	Rp 8.176.929.496.299	<i>Defisit</i>
2019	Rp8.765.153.020.783	Rp9.162.655.939.832	<i>Defisit</i>
2020	Rp7.545.416.994.176	Rp8.032.680.988.065	<i>Defisit</i>
2021	Rp8.326.878.076.226	Rp7.819.077.321.546	<i>Surplus</i>
2022	Rp8.791.308.679.482	Rp9.448.236.778.683	<i>Defisit</i>

Sumber: BPKAD Pemkot Surabaya

Nilai realisasi pendapatan di tahun 2020 berdasarkan tabel diatas menjadi yang terendah. Penurunan pendapatan asli daerah menjadi salah satu penyebab rendahnya nilai realisasi total pendapatan. Pandemi Covid-19 mengakibatkan aktivitas perekonomian turun sehingga berdampak kepada turunnya pendapatan yang diterima oleh pemerintah kota

surabaya. Faktor yang memengaruhi mobilitas ekonomi sehari-hari adalah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) (Ashraf & Goodell, 2022). Dengan adanya pembatasan sosial dan aktivitas pada saat pandemi, terdapat beberapa perusahaan yang melakukan pengurangan gaji, bahkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya. Banyaknya pekerja yang kehilangan pekerjaan turut meningkatkan jumlah pengangguran Kota Surabaya. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surabaya meningkat drastis pada Tahun 2019 mencapai 5,76% dan ditahun 2020 naik menjadi 9,79% (Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, 2022). Kenaikan tingkat pengangguran tersebut tentu berpengaruh terhadap perekonomian di kota Surabaya. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis performa keuangan daerah di Pemerintah Daerah Kota Surabaya sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 terjadi.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengukuran kinerja keuangan merupakan evaluasi terhadap kemajuan pencapaian tugas/kegiatan yang direncanakan di bidang keuangan dalam jangka waktu tertentu. Untuk melakukan pengukuran kinerja terdapat beberapa rasio yang dapat digunakan antara lain adalah (Fathah, 2017) :

Rasio Kemandirian Daerah

Kapabilitas daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan yang dapat berupa pembangunan dan pemberiana layanan kepada masyarakat dapat dinilai dengan menggunakan rasio ini. Perhitungan kemandirian daerah dilakukan dengan membandingkan PAD dengan tranfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan pinjaman (Halim, 2007).

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer pusat atau provinsi dan pinjaman}} \times 100\%$$

Hasil dari perhitungan rasio tersebut menunjukkan seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam berkontribusi bagi kemajuan pembangunan yang ada di daerahnya. Tabel 2 berikut ini memberikan acuan dari sisi keuangan untuk mengamati suatu pola hubungan dengan kemampuan daerah

Tabel 2. Hasil Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dengan Pola Hubungan

Kemandirian Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
<i>Very Low</i>	0%-25%	Instruktif
<i>Low</i>	25%-50%	Konstruktif
<i>Medium</i>	50%-75%	Partisipatif
<i>High</i>	75%-100%	Delegatif

Sumber: (Halim, 2007)

Rasio Keserasian Belanja

Untuk melihat langkah suatu pemerintah daerah yang memprioritaskan alokasi dana pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal maka menggunakan rasio keserasian belanja. Ketika nilai persentase dana yang didistribusikan untuk belanja rutin semakin tinggi, maka menunjukkan semakin kecilnya nilai persentase belanja investasi yang diperuntukkan dalam memberikan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat. Terdapat dua jenis perhitungan dalam rasio keserasian yakni rasio belanja operasi dan rasio belanja modal. Perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah disebut dengan rasio belanja operasi. Tujuan adanya rasio ini adalah menginformasikan terkait porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi kepada pembaca laporan. Dalam rasio ini, yang dimaksud dengan belanja operasi adalah belanja yang manfaatnya telah habis dipakai dalam satu tahun anggaran, sehingga bersifat jangka pendek, rutin, dan berulang dalam hal tertentu. Tingkat pendapatan dan tingkat belanja operasi memiliki korelasi, jika tingkat pendapatan pemerintah daerah tinggi maka kecenderungan pemerintah daerah untuk memiliki belanja operasi juga akan tinggi begitu juga sebaliknya (Mahmudi, 2010). Rumus untuk menghitung Rasio belanja operasi adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Operasional} = \frac{\text{Realisasi Total Belanja Operasional}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Untuk mengetahui besarnya tingkat belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk investasi dalam bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan maka dapat menggunakan rasio belanja modal dimana besaran dari belanja modal umumnya berkisar antara 5-20% (Mahmudi, 2010). Berikut ini adalah formula untuk menghitung Rasio belanja modal:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 3 berikut merupakan pedoman sebagai bentuk kriteria dalam menetapkan keserasian belanja keuangan daerah:

Tabel 3. Hasil Rasio Keserasian Belanja

Keserasian Belanja Daerah Otonom Kemampuan Keuangan	Rasio Keserasian Belanja (%)
<i>Not Compatible</i>	0% – 20%
<i>Less Compatible</i>	20% - 40%
<i>Quite Compatible</i>	40% - 60%
<i>Compatible</i>	60% - 80%
<i>Very Compatible</i>	80% - 100%

Sumber : (Halim, 2012)

Kegiatan pembangunan yang dinamis dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan dalam mencapai pertumbuhan yang ditargetkan menjadi pengaruh bahwa tidak adanya acuan yang pasti terkait nilai ideal rasio belanja operasi maupun modal terhadap APBD. Meskipun demikian, peran pemerintah daerah dalam memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar, terutama sebagai daerah di negara berkembang. Oleh sebab itu, rendahnya nilai rasio belanja modal (pembangunan) di suatu daerah menunjukkan bahwa masih diperlukan peningkatan sesuai dengan pembangunan di daerah.

Rasio Pertumbuhan

Pemerintah daerah dapat melihat perkembangan dari kinerja anggaran pemerintahannya, baik dalam satu periode berjalan ataupun dalam beberapa periode. Rasio pertumbuhan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk memantau apakah kinerja anggaran pemerintah mengalami pertumbuhan pada anggaran pendapatan maupun pertumbuhan pada anggaran belanja dengan arah yang positif atau negatif (Mahmudi, 2010). Pemantauan perkembangan yang dilakukan pemerintah daerah ini memiliki tujuan agar pemerintah dapat mempertahankan ke efisienan maupun ke akuratan dari anggarannya, hal ini bertujuan agar anggaran pemerintah dapat berhasil dicapai dalam periode anggaran berlangsung maupun ke periode berikutnya. Dengan adanya rasio pertumbuhan ini maka pemerintah daerah dapat mengetahui komponen-komponen dari pendapatan dan pengeluaran daerah yang mengalami pertumbuhan, hal itu dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi yang bertujuan untuk meningkatkan perhatian pada pada komponen yang berpotensi mengalami pertumbuhan baik pada arah positif maupun negatif (Halim, 2007). Berikut ini adalah rumus untuk menghitung rasio pertumbuhan Fathah, (2017) :

$$r = \frac{P_n - P_o}{P_o} \times 100\%$$

r = Rasio Pertumbuhan

P_n = Total Pendapatan/Belanja yang dihitung pada tahun ke-n

P_o = Total Pendapatan/Belanja yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n)

Rasio Efektivitas PAD

Pemerintah daerah dapat melihat apakah pegerahan dari penerimaan pendapatan asli daerahnya sudah di arahkan sesuai dengan target-target sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Kesesuaian pengerahan pada target ini dapat dipantau melalui rasio efektivitas (Mahmudi, 2010). Pemerintah daerah dapat membandingkan antara anggaran yang di buat untuk PAD dengan realisasi dari anggaran pendapatan asli daerah yang ada. Hal ini dapat dihitung dengan memasukkan rumus berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Po Target Penerimaan PAD yang ditetapkan}} \times 100\%$$

Adapun Hasil Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Hasil Rasio Efektivitas PAD

Kriteria Efektivitas	Persentase Efektivitas (%)
Very Effective	>100%
Effective	100%
Quite Effective	90%-99%
Less Effective	75%-89%
Not Effective	<75%

Sumber : (Mahmudi, 2019)

METODE PENELITIAN

Metode deskriptif kuantitatif menjadi metode yang digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengamati laporan keuangan yang tersedia di situs resmi Pemerintah Kota Surabaya. Laporan tersebut adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2018-2022, yang dapat diakses pada laman Transparansi Pengelolaan Anggaran. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder sebagai sumber informasi. Data yang digunakan berupa angka-angka yang ada dalam LRA Pemkot Surabaya Tahun Anggaran 2018-2022. Sumber data ini diakses dari situs resmi Pemerintah Kota Surabaya. Data yang didapatkan kemudian dilakukan analisis menggunakan menggunakan teknik analisis rasio. Teknik ini mengikuti tahapan-tahapan dalam penelitian deskriptif kuantitatif, yang meliputi:

- 1) Pengumpulan dan pengamatan data, data yang diperlukan dikumpulkan dan diamati selama lima periode, yaitu dari tahun 2018 hingga 2022. Data ini diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran yang tersedia di situs resmi Pemkot Surabaya
- 2) Perhitungan rasio keuangan, data keuangan dalam Laporan Realisasi Anggaran dihitung untuk setiap periodenya. Perhitungan ini menggunakan beberapa rasio, yaitu rasio kemandirian, rasio keserasian belanja, rasio pertumbuhan, dan rasio efektivitas.
- 3) Pembuatan deskripsi dan gambaran, berupa grafik dari hasil perhitungan keempat rasio sebelumnya
- 4) Menganalisis hasil perhitungan, deskripsi, serta gambaran pengukuran kinerja keuangan dari rasio kemandirian, rasio keserasian belanja, rasio pertumbuhan, dan rasio efektivitas.
- 5) Memberikan kesimpulan dari hasil analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut hasil dari analisis data keuangan kota Surabaya dalam periode penelitian 2018-2022 dengan menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Keserasian Belanja, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Efektivitas, sebagai berikut:

Rasio Kemandirian Keuangan

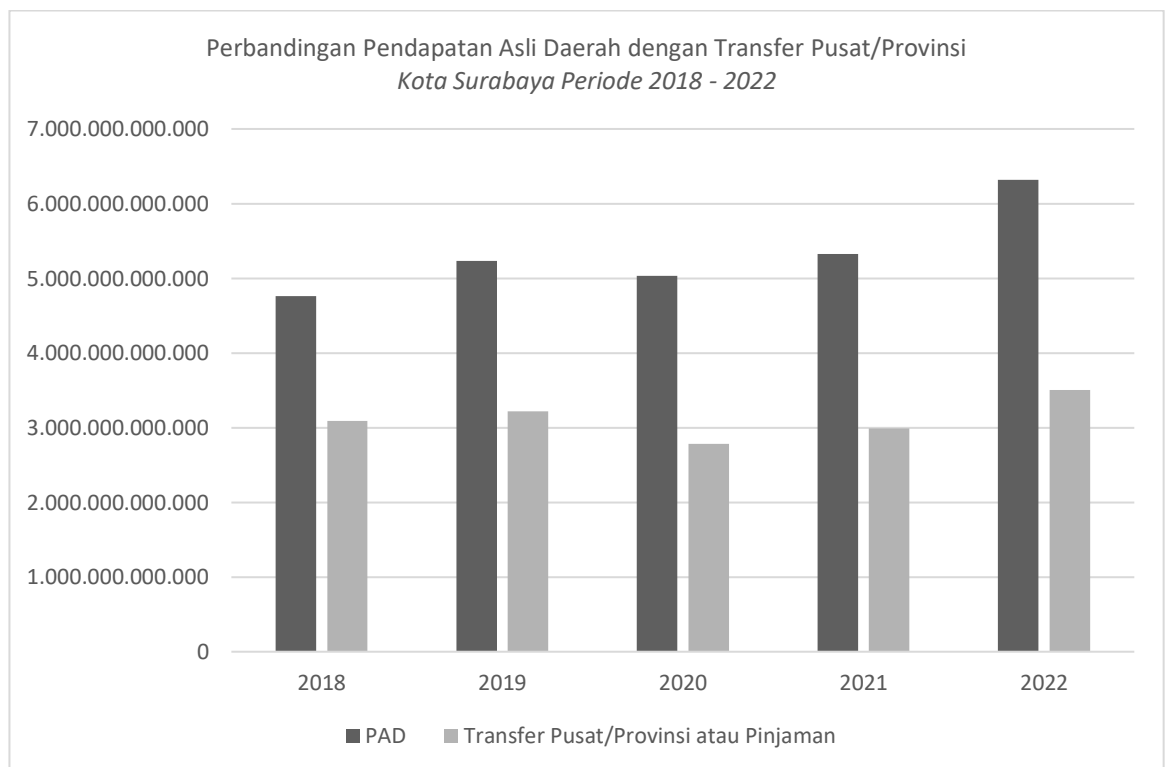
Rasio Kemandirian Keuangan kota Surabaya Periode 2018 – 2022 dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini.

Tabel 5. Rasio Kemandirian Keuangan Kota Surabaya Periode 2018-2022

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Transfer Pusat/Provinsi	Persentase	Nilai	Pola Hubungan
2018	4.758.967.236.960	3.091.812.357.308	154%	High	Delegatif
2019	5.234.687.226.266	3.219.666.956.468	163%	High	Delegatif
2020	5.035.094.239.075	2.784.377.477.969	181%	High	Delegatif
2021	5.322.810.142.550	2.986.875.924.098	178%	High	Delegatif
2022	6.316.345.973.654	3.506.057.114.020	180%	High	Delegatif
Rata-Rata			171%	High	Delegatif

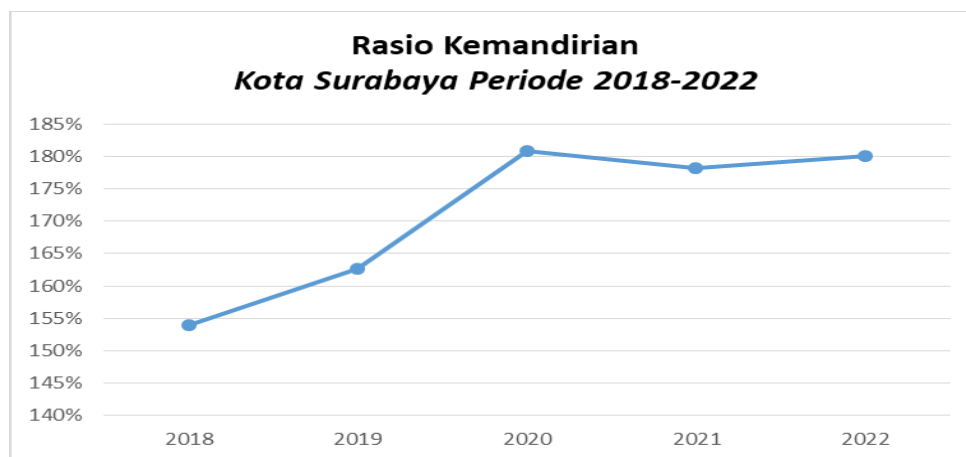
Sumber: Data Diolah (2023)

Selanjutnya, perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Biaya Transfer Pusat/ Provinsi periode tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Grafik Perbandingan PAD dengan Transfer Pusat/Provinsi
Sumber: Data Diolah (2023)

Grafik Rasio Kemandirian Kota Surabaya periode Tahun 2018 -2022 daapt dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Grafik Rasio Kemandirian Keuangan

Sumber: Data Diolah (2023)

Tabel 5 memberikan gambaran bahwa tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Kota Surabaya sebesar 171% atau dapat dikategorikan tinggi sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada lagi keterlibatan pemerintah baik tingkat pusat ataupun provinsi karena Pemkot Surabaya mampu melaksanakan urusan otonomi daerah atau dengan kata lain masuk dalam kategori delegatif (Muttaqin & Akbar, 2023). Hal ini tercermin pada grafik 1, yang menunjukkan dalam periode 2018-2022 secara keseluruhan memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih tinggi dari Transfer Pusat/Provinsi. Akan tetapi, jika dilihat pada grafik 2, tahun 2021 Kota Surabaya mengalami penurunan rasio kemandirian keuangan dan meningkat lagi pada tahun 2022. Meskipun pada masa pandemi COVID-19 dan mengalami penurunan, rasio kemandirian keuangan Kota Surabaya tetap jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi COVID-19 (2018-2019).

Rasio Keserasian Belanja

Rasio Keserasian Belanja Operasional

Rasio Keserasian Belanja Operasional Kota Surabaya Periode 2018 – 2022, dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini.

Tabel 6. Rasio Keserasian Belanja Operasional Periode 2018-2022

Tahun	Belanja Operasional	Total Belanja	Persentase
2018	5.731.527.814.355	8.176.929.496.298	70%
2019	6.404.557.852.973	9.162.655.939.831	70%
2020	6.439.039.886.246	8.032.680.988.065	80%
2021	6.771.433.976.328	7.819.077.321.545	87%
2022	7.679.441.144.733	9.448.236.778.683	81%
Rata-Rata			78%

Adapun Perbandingan Belanja Operasional dengan Total Belanja Kota Surabaya periode 2018 – 2022 dapat dilihat pada gambar 3 berikut ini.



Gambar 3. Grafik Perbandingan Belanja Operasional dengan Total Belanja

Sedangkan Rasio Keserasian Belanja Operasional Kota Surabaya periode 2018 – 2022 dapat dilihat pada grafik 4 berikut.



Gambar 4. Grafik Rasio Keserasian Belanja Operasional

Rasio Kesenjangan Belanja Modal

Tabel 7 Menunjukkan Rasio Kesenjangan Belanja Modal Kota Surabaya Periode 2018-2022.

Tabel 7. Rasio Kesenjangan Belanja Modal Periode 2018-2022

Tahun	Belanja Modal	Total Belanja	Persentase
2018	2.430.061.039.309	8.176.929.496.298	30%
2019	2.754.304.824.082	9.162.655.939.831	30%
2020	1.583.663.159.605	8.032.680.988.065	20%
2021	1.016.336.503.390	7.819.077.321.545	13%
2022	1.766.030.466.528	9.448.236.778.683	19%
Rata-Rata			22%

Sedangkan pada Grafik 5. Dapat dilihat Perbandingan Belanja Modal dengan Total Belanja Kota Surabaya Tahun 2018 – 2022.



Gambar 5. Grafik Perbandingan Belanja Modal dengan Total Belanja

Sedangkan pada Grafik 6, dapat dilihat Rasio Kesenjangan Belanja modal Kota Surabaya tahun 2018 - 2022



Gambar 6. Rasio Kesenjangan Belanja modal

Berdasarkan pengolahan data dan perhitungan rasio kesenjangan belanja operasional dan belanja modal Kota Surabaya periode 2018-2022, dapat dilihat pada grafik 4 dan grafik 6

bahwa sebagian besar dana diprioritaskan untuk belanja operasional dibandingkan belanja modal sehingga rasio belanja modal relatif kecil, yaitu sebesar 78% belanja operasional dan 22% belanja modal. Dapat dilihat pula pada grafik 4 dan grafik 6, sebelum pandemi COVID-19 (2018 dan 2019) rasio belanja operasional dan modal konstan yaitu sebesar 70% dan 30%, tetapi setelah pandemi COVID-19 (2020-2022) rasio keserasian belanja menunjukkan dana lebih diprioritaskan pada belanja operasional.

Hal ini menunjukkan Pemerintah Kota Surabaya dapat mengalokasikan dan mengatur dana belanja daerah secara baik, optimal, dan sesuai dengan kebutuhannya dalam lima periode (2018-2022).

Rasio Pertumbuhan

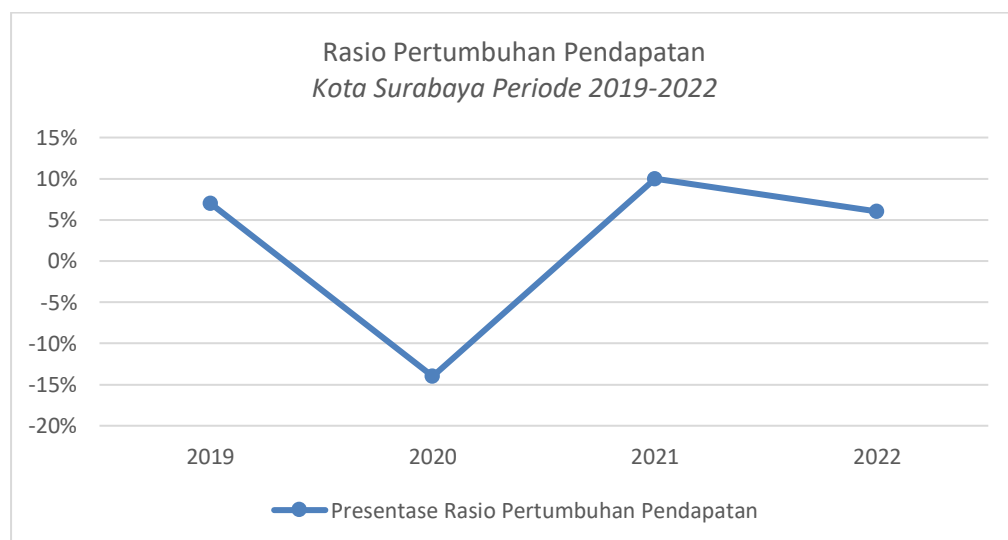
Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) digunakan oleh pemerintah untuk mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintahan suatu daerah dalam mempertahankan maupun meningkatkan pencapaian darahnya dari satu periode ke periode berikutnya.

Tabel 8. Rasio Pertumbuhan Pendapatan Periode 2019-2022

Tahun	Total Pendapatan (Pn)	Total Pendapatan (P0)	Pn - P0	Persentase
2019	8.765.153.020.782	8.175.219.120.669	589.933.900.113	7%
2020	7.545.416.994.175	8.765.153.020.782	-1.219.736.026.607	-14%
2021	8.326.878.076.226	7.545.416.994.175	781.461.082.051	10%
2022	8.791.308.679.482	8.326.878.076.226	464.430.603.256	6%
Rata-Rata				2%

Gambar 7 dibawa ini menunjukkan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Kota Surabaya periode tahun 2018 -2022



Gambar7. Rasio Pertumbuhan Pendapatan

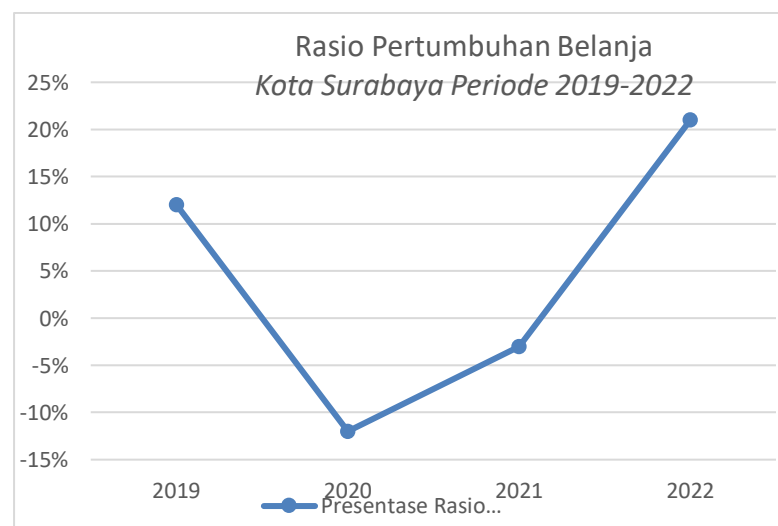
Rasio Pertumbuhan Belanja

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pendapatan daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan, baik secara nominal maupun persentase pertumbuhannya, kecuali pada tahun 2020. Pada tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat signifikan yaitu total pendapatan adalah sebesar Rp.7.545.416.994.175 dengan tingkat pertumbuhan sebesar -14% (defisit) yang dimana hal itu bisa terjadi karena adanya pandemi covid-19 ditahun tersebut. Di dalam pemerintahan kota Surabaya ini Total pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp.8.326.878.076.226 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 10%. Berdasarkan uraian tersebut, terjadi peningkatan penerimaan pendapatan di Kota Surabaya setiap tahun kecuali pada saat pandemi karena saat pandemi pendapatan daerah menurun tetapi kebutuhan belanjanya meningkat sehingga pemerintah daerah melakukan upaya-upaya dalam menghadapi masa pandemi yang sebagian besar dananya disalurkan untuk bidang kesehatan.

Tabel 9. Rasio Pertumbuhan Belanja Periode 2019-2022

Tahun	Total Belanja (Pn)	Total Belanja (P0)	Pn - P0	Persentase
2019	9.162.655.939.831	8.176.929.496.298	985.726.443.533	12%
2020	8.032.680.988.065	9.162.655.939.831	-1.219.974.951.766	-12%
2021	7.819.077.321.545	8.032.680.988.065	-213.603.666.520	-3%
2022	9.448.236.778.683	7.819.077.321.545	1.629.159.457.138	21%
Rata-Rata				4%

Rasio Pertumbuhan Belanja Kota Surabaya Periode 2018-2022 dapat dilihat pada gambar 8 dibawah ini.



Gambar 8. Rasio Pertumbuhan Belanja

Berdasarkan pengolahan data dan perhitungan pada rasio pertumbuhan yang terdiri dari pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan belanja pada periode 2019-2022, dapat dilihat pada grafik 7 dan 8 selama periode 2019-2021 rasio pertumbuhan pendapatan dan belanja memiliki pergerakan yang selaras, tetapi pada saat 2022 rasio pertumbuhan belanja mengalami kenaikan sedangkan rasio pertumbuhan pendapatan mengalami penurunan. Dan jika dilihat pada tabel 5 dan 6, tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan baik pada rasio pertumbuhan pendapatan maupun pertumbuhan belanja.

Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target PAD yang sudah direncanakan.

Tabel 10. Rasio Efektivitas Periode 2018-2022

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD	Persentase	Nilai
2018	4.973.031.004.727	4.758.967.236.960	104%	<i>Very Effective</i>
2019	5.381.920.253.809	5.234.687.226.266	103%	<i>Very Effective</i>
2020	4.289.960.292.372	5.035.094.239.075	85%	<i>Not Effective</i>
2021	4.727.280.629.669	5.322.810.142.550	89%	<i>Quite Effective</i>
2022	5.314.695.257.794	6.316.345.973.654	84%	<i>Not Effective</i>
Rata-Rata			93%	<i>Quite Effective</i>

Gambar 9 dibawah menunjukkan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ssurabaya periode tahun 2018-2022



Gambar 9. Rasio Efektivitas PAD

Berdasarkan pengolahan data dan perhitungan pada Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat pada grafik 8, bahwa perubahan untuk setiap tahun pada 5 periode

tidak terlalu signifikan, tetapi jika dilihat dari tabel 10, saat sebelum pandemi COVID-19 (2018 dan 2019) rasio efektivitas PAD memiliki persentase yang cukup konstan dan sangat efektif yaitu 104% dan 103%. Sedangkan setelah pandemi COVID-19 (2020-2022) rasio efektivitas PAD mengalami penurunan. Dalam artian COVID-19 cukup memberikan dampak pada efektivitas PAD di Pemerintah Kota Surabaya. Secara umum dapat dikatakan bahwa Pemkot Surabaya memiliki tingkat rasio efektivitas yang cukup efektif atau sebesar 93%, artinya Pemerintah Kota Surabaya memiliki kinerja yang baik dan kemampuan yang baik dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari target/anggaran yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah kinerja keuangan dari Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2018-2022 dikategorikan tinggi. Akan tetapi untuk perhitungan analisis rasio keserasian belanja modal dibandingkan belanja operasional, menunjukkan bahwa belum ada keserasian. Selanjutnya, rasio pertumbuhan keuangan daerah pemerintah Kota Surabaya masih berada pada kategori rendah. Pengukuran kinerja keuangan yang terakhir didasarkan rasio efektivitas PAD Kota Surabaya berjalan masih cukup efektif. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka diharapkan Pemerintah Kota Surabaya dapat lebih memaksimalkan upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya sehingga potensi yang dimiliki dapat menjadi sumber pendapatan dan tingkat kemandirian pemerintah daerah dapat meningkat. Selain pendapatan asli daerah, pemerintah daerah harus dapat memperhitungkan dengan cermat kebutuhan belanja daerahnya. Hal ini diperlukan agar belanja daerah dapat memberikan kenaikan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan tingkat pembagunan yang ada di daerahnya sehingga tujuan dari adanya otonomi daerah dapat tercapai.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan diantaranya adalah menggunakan data laporan keuangan dua tahun sebelum pandemi, selama pandemi, dan dua tahun setelah pandemi. Selain itu penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif. Dengan keterbatasan dalam penelitian ini maka untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas periode pengamatan dan lebih detail membahas kinerja keuangan pemerintah daerah dengan metode kualitatif. Hal ini perlu dilakukan agar dapat melihat secara mendalam fenomena yang sedang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashraf, B. N., & Goodell, J. W. (2022). COVID-19 social distancing measures and economic growth: Distinguishing short- and long-term effects. *Finance Research Letters*, 47(PA), 102639. Retrieved from <https://doi.org/10.1016/j.frl.2021.102639>
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya. (n.d.). Laporan Realisasi Anggaran Kota Surabaya Tahun 2018 - 2022.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya. (2022). Pemkot Surabaya Pertahankan Opini Wtp Lkpd Sepuluh Kali Berturut-Turut. Pemerintah Kota Surabaya.
- Fathah, R. (2017). Analisis rasio keuangan untuk penilaian kinerja pada pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal EBBANK: Jurnal Ilmiah Bidang Ekonomi Bisnis Dan Perbankan*, 8(1), 33–48.

- Halim, A. (2007). Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat.
- Halim, A. (2012). Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat.
- Kompas. (2020). Pemkot Surabaya Alokasikan Rp 819 Miliar untuk Tangani Covid-19. Kompas.Com. Retrieved January 14, 2024 from <https://biz.kompas.com/read/2020/07/14/095144928/pemkot-surabaya-alokasikan-rp-819-miliar-untuk-tangani-covid-19>
- Mahmudi. (2010). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Analisis Edisi Dua. UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. UPP STIM YKPN.
- Morita, H., & Ono, T. (2024). COVID-19 uncertainty index in Japan: Newspaper-based measures and economic activities. *International Review of Economics and Finance*, 93(PA), 390–403. Retrieved from <https://doi.org/10.1016/j.iref.2024.03.041>
- Muttaqin, G. I., & Akbar, F. S. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Madiun Periode 2018-2021. *Sustainable*, 3(1), 20. Retrieved from <https://doi.org/10.30651/stb.v3i1.18408>
- Virania, T. A., Choiruddin, A., & Ratnasari, V. (2021). Analisis Risiko Penyebaran Kasus Covid-19 di Surabaya Raya Menggunakan Model Thomas Cluster Process. *Inferensi*, 4(1), 57. Retrieved from <https://doi.org/10.12962/j27213862.v4i1.8874>